

# **BAB I.**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka terselenggaranya good governance diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan syah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi (Inpres No 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dilengkapi dengan penetapan kinerja sesuai dengan Permen PAN & RB No 53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu pelaksana mandat bidang pertanian dalam hubungannya dengan terselenggaranya good governance, berupaya untuk menerapkan mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sesuai dengan tuntutan lingkungan perubahan yang terjadi sehingga mampu menjawab pelaksanaan fungsi yang diembannya. Hal ini sejalan dengan TAP MPR RI No.XI/MPR/1998 dan UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas KKN yang aturan pelaksanaannya didasarkan pada INPRES No. 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Media pertanggungjawaban tersebut dilakukan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini merupakan media informasi pertanggungjawaban Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara yang menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja instansi atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam hubungannya dengan pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2013-2018.

Rencana Strategis yang disusun merupakan komitmen dari seluruh jajaran Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara yang akan dipedomani secara konsisten dalam kurun waktu tahun 2013 s/d 2018. Rencana Strategis bersifat elastis terhadap pengaruh dari perubahan yang terjadi di dalam lingkungan organisasi maupun dari luar organisasi. Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Tahun 2013-2018, disusun suatu Rencana Kinerja (Performance Plan) setiap tahunnya. Rencana kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, pada tingkat sasaran strategis.

Perkebunan rakyat di Provinsi Sumatera Utara yang luasannya mencapai 1.126.471.916,3 (53%) dibandingkan dengan PTPN,PBSN dan PBSA 998.946,79 (47%), dilihat dari kontribusi produksinya, masih tertinggal apabila dibanding dengan yang dicapai perkebunan besar lainnya. Secara umum kondisi rendahnya produksi perkebunan rakyat di masing-masing disebabkan berbagai masalah yang menyangkut kemampuan kompetensi SDM, keterbatasan modal, rendahnya pemanfaatan Iptek yang pada gilirannya akan menyebabkan terbatasnya kegiatan intensifikasi, peremajaan maupun rehabilitasi yang dilaksanakan oleh perkebunan rakyat.

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut sekaligus mendorong petani untuk mampu mengembangkan dirinya serta kelompoknya ke dalam kelembagaan ekonomi/koperasi serta dapat memanfaatkan potensi ekonomi secara efisien dan berdaya saing tinggi, maka kebijaksanaan pembangunan

perkebunan Sumatera Utara diarahkan pada Pengembangan Sistem dan Usaha Agribisnis Berbasis Perkebunan.

## **B. Gambaran Umum Organisasi Dinas Perkebunan**

### **1. Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara, bahwa Dinas Perkebunan adalah merupakan unsur Pelaksana Otonomi Daerah Pemerintah Provinsi, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

- a. Dinas Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah/ kewenangan provinsi, dibidang produksi perkebunan, perlindungan perkebunan, Usaha tani perkebunan, dan Sarana Usaha perkebunan serta tugas pembantuan,
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point a, Dinas Perkebunan menyelenggarakan fungsi :
  - Perumusan kebijakan dibidang produksi perkebunan, perlindungan perkebunan, usaha tani perkebunan dan sarana usaha perkebunan;
  - Penyelenggaraan urusan pemerintahan produksi dan pelayanan umum dibidang produksi perkebunan, perlindungan perkebunan, usaha tani perkebunan dan sarana usaha perkebunan;
  - Pelaksanaan pemberian perizinan dibidang perkebunan;
  - Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perkebunan;
  - Pelaksanaan tugas pembantuan dibidang perkebunan;
  - Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal;
  - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Mandat yang diberikan kepada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu perangkat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Provinsi dan tugas Dekonsentrasi di bidang perkebunan adalah mandat

kewenangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, yaitu :

- a. Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan inventarisasi dan pemetaan kebun.
- b. Penyelenggaraan pembentukan dan perwilayahan areal perkebunan lintas Kabupaten/Kota.
- c. Penyusunan perwilayahan, design, pengendalian lahan dan industri primer bidang perkebunan lintas Kabupaten/ Kota.
- d. Penyusunan rencana makro perkebunan lintas Kabupaten/ Kota.
- e. Penyelenggaraan perizinan usaha perkebunan lintas Kabupaten/Kota.
- f. Pengawasan perbenihan, pupuk, pestisida, alat dan mesin dibidang perkebunan.
- g. Pelaksanaan pengamatan, peramalan organisme pengganggu tumbuhan dan pengendalian hama terpadu tanaman perkebunan.
- h. Penyelenggaraan dan pengawasan atas rehabilitasi, reklamasi, system silvi kultur, budidaya dan pengolahan.

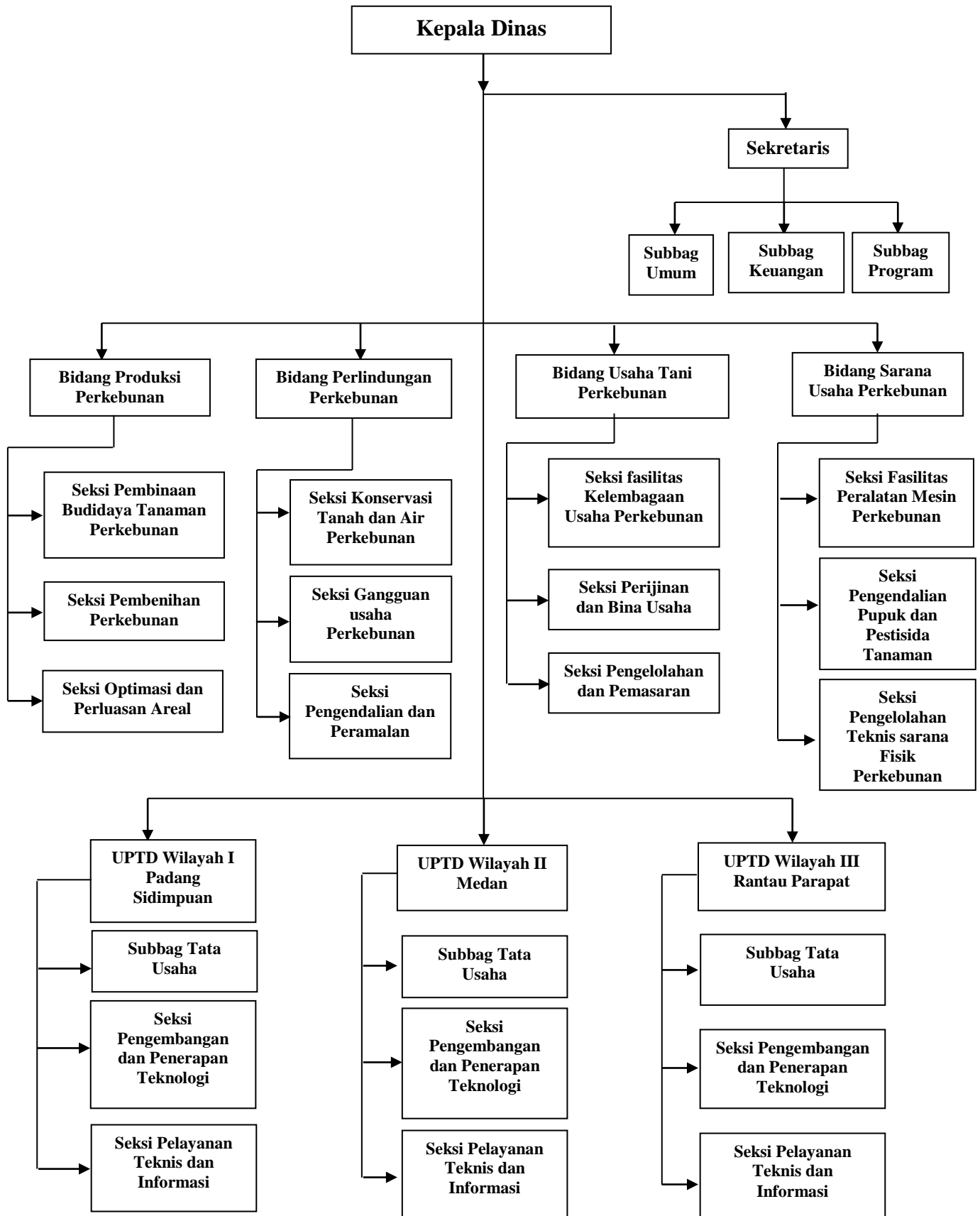
## 2. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut diatas, Kepala Dinas Perkebunan dibantu oleh :

- 1) Sekretaris yang membawahi 3 Kepala Sub Bagian (Subbagian Umum, Subbagaian Keuangan dan Subbagian Program);
- 2) Kepala Bidang Produksi Perkebunan yang membawahi 3 Kepala Seksi (Seksi Pembinaan Budidaya Tanaman, Seksi Perbenihan, Seksi Optimasi dan Perluasan Areal)
- 3) Kepala Bidang Perlindungan Perkebunan yang membawahi 3 Kepala Seksi (Seksi Konservasi Tanah dan Air, Seksi Gangguan Usaha Perkebunan, Seksi Pengendalian Peramalan OPT)
- 4) Kepala Bidang Usaha Tani Yang membawahi 3 Kepala Seksi (Seksi Fasilitasi Kelembagaan Usaha Perkebunan, Seksi Perizinan dan Bina Usaha Perkebunan, Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan)

- 5) Kepala Bidang Sarana Usaha Perkebunan yang membawahi 3 Kepala Seksi (Seksi Fasilitasi Peralatan Mesin Perkebunan, Seksi Teknis Sarana Fisik, Seksi Pengendalian Pupuk dan Pestisida)
- 6) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Wilayah I Padang Sidempuan yang membawahi 3 Kepala Seksi
- 7) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Wilayah II Medan yang membawahi 3 Kepala Seksi
- 8) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Wilayah III Rantau Prapat yang membawahi 3 Kepala Seksi

Gambar 1.  
Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara



### 3. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 ini, pekerjaan didukung oleh personil dengan Sumber Daya Manusia terhitung sampai dengan 31 Desember 2015 sebanyak 174 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 1. Data Pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Tahun 2015

No	Uraian	Jumlah
1	2	3
1	Jumlah Pegawai	174
2	Kualifikasi Menurut Pendidikan	174
	SD	1
	SLTP	4
	SLTA	65
	D-1	
	D-2	
	D-3	9
	S1	70
	S2	25
	S3	
3	Kualifikasi Menurut Golongan	174
	I	3
	II	40
	III	112
	IV	19
4	Kualifikasi Menurut Jabatan	174
	II	1
	III	8
	IV	22
	Staf	143

## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahun 2015

Rencana Strategis yang disusun merupakan komitmen dari seluruh jajaran Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara yang akan dipedomani secara konsisten dalam kurun waktu tahun 2013 s/d 2018. Rencana Strategis bersifat elastis terhadap pengaruh dari perubahan yang terjadi di dalam lingkungan organisasi maupun dari luar organisasi.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Tahun 2013-2018, disusun suatu Rencana Kinerja setiap tahunnya. Rencana kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, pada tingkat sasaran strategis. Rencana Kinerja 2014 ini merupakan komitmen satuan kerja perangkat daerah untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya untuk selanjutnya dijadikan dasar dalam penyusunan penganggaran SKPD.

#### 1. Visi, Misi Tujuan dan Sasaran

**Visi** Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara : *“Terwujudnya kesejahteraan masyarakat perkebunan melalui penerapan agribisnis yang berdaya saing, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan”*

**Misi** Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara :

Misi 1 : Memfasilitasi peningkatan usaha perkebunan serta penumbuhan kemitraan yang sinergis antar pelaku usaha perkebunan secara berkelanjutan

Misi 2 : Mengembangkan sistem agroindustri terpadu di perdesaan dalam penumbuhan “farm-gate marketing system” melalui keterpaduan sistem produksi, penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.



**Tujuan :**

Berdasarkan visi dan misi pembangunan perkebunan serta memperhatikan potensi perkebunan rakyat merupakan bagian terbesar dari seluruh areal perkebunan di Sumatera Utara, maka pembangunan Perkebunan diarahkan kepada pencapaian tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan produksi, produktivitas, nilai tambah dan daya saing perkebunan.
2. Meningkatnya pendapatan petani, kesempatan kerja di perdesaan, dan peningkatan nilai tambah produk perkebunan.

**Sasaran Strategis :**

1. Meningkatnya produksi, produktivitas, nilai tambah dan daya saing perkebunan
2. Terbangunnya sistem manajemen pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan yang berpihak kepada petani.

**Strategi, Arah Kebijakan dan Program SKPD**

Kebijakan pembangunan perkebunan kedepannya diarahkan kepada sinergisitas seluruh sumberdaya perkebunan dalam rangka peningkatan produksi, produktifitas dan kualitas produk perkebunan untuk mendukung daya saing usaha perkebunan melalui pengembangan, peremajaan, intensifikasi, diversifikasi, mekanisasi peralatan perkebunan, peningkatan sumberdaya manusia, kelembagaan dan kemitraan usaha serta investasi usaha perkebunan sesuai dengan kaidah pengelolaan sumberdaya alam (SDA) dan lingkungan hidup. Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan perkebunan Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

Strategi 1 : Melaksanakan peremajaan, intensifikasi, rehabilitasi, optimasi tanaman, diversifikasi, perlindungan tanaman dan penyediaan sarana prasarana untuk mendukung peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan;

**Arah Kebijakan** yang diambil dalam upaya pelaksanaan strategi pertama adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan fasilitasi penggunaan sarana dan prasarana perkebunan (bibit, pestisida, pupuk, peralatan perkebunan, mekanisasi perkebunan, pembangunan jalan produksi dan lainnya) melalui paket penggunaan teknologi secara on-farm;
- 2) Kebijakan Peningkatan pengamatan, pengendalian OPT dan Pengembangan SL PHT Kebijakan Identifikasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi gangguan usaha perkebunan;
- 3) Kebijakan fasilitasi pembangunan kebun sumber benih, eksplorasi BPT benih, dan peningkatan kapabilitas penangkar benih;
- 4) Kebijakan pembinaan, monitoring dan evaluasi penangkar/sumber benih/bibit perkebunan;
- 5) Kebijakan fasilitasi terlaksananya pola Integrasi Sawit Sapi Energy (ISSE);
- 6) Dukungan pengembangan manajemen dan teknis lainnya

**Strategi 2** : Menumbuhkan dan memberdayakan kelembagaan petani untuk memperkuat akses petani dalam permodalan, teknologi, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.

**Arah Kebijakan** yang diambil dalam upaya pelaksanaan strategi pertama adalah sebagai berikut :

- 1) Kebijakan fasilitasi dukungan penyediaan modal petani/bankable (Revitalisasi Perkebunan) & Non Bank;
- 2) Mendorong terjalinnya kemitraan petani dan pengusaha perkebunan
- 3) Fasilitasi dalam rangka mengikuti event/ pameran/ promosi perkebunan
- 4) Kebijakan fasilitasi bantuan alat, mesin panen, pasca panen dan sarana pendukung lainnya
- 5) Kebijakan pembinaan, pelatihan, bimbingan, paket penerapan teknologi guna menunjang peningkatan nilai tambah hasil produksi perkebunan
- 6) Kebijakan Pembinaan Usaha Perkebunan Besar (PTPN/PBSN/PBSA)

- 7) Dukungan pengembangan manajemen dan teknis lainnya

## **Program**

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan perkebunan di Sumatera Utara, SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 sesuai dengan tugas dan fungsinya melaksanakan 5 (lima) program pendukung/rutin dan 2 (dua) program prioritas sebagai berikut :

1. Program Pendukung/Rutin

- 1) PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
- 2) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
- 3) PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
- 4) PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
- 5) PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

2. Program Utama

- a) PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS TANAMAN PERKEBUNAN

Program ini dimaksud untuk mendukung peremajaan, intensifikasi, rehabilitasi, ekstensifikasi dan diversifikasi tanaman guna mendukung perluasan dan percepatan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan melalui peningkatan SDM dan pengusaha Iptek.

- b) PROGRAM PENINGKATAN MUTU HASIL DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN

Peningkatan Mutu Hasil dan Pemasaran Hasil Perkebunan : dimaksudkan untuk meningkatkan pengolahan dan perkebunan guna mendukung peningkatan daya saing dan nilai tambah serta mutu hasil perkebunan.

## B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggungjawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja. Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Penetapan kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara dilakukan setelah ditandatanganinya Dokumen Pelaksanaan Anggaran mencakup penetapan indikator kinerja dan target kinerja atas sasaran strategis yang dilaksanakan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan pada tahun tersebut.

Tabel 2. Target Indikator Kinerja Tahun 2015

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya luas areal, produksi dan produktivitas tanaman perkebunan	Produktivitas tanaman perkebunan	2.57 %
		Produksi perkebunan rakyat	6.570.323,89 ton
		Luas areal perkebunan rakyat	1,101,857.22 Ha
Program			Anggaran
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	4.412.804.800
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	1.514.000.000
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp.	300.000.000
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp.	769.610.000
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.	990.000.000
6.	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan	Rp.	13.918.242.500
7.	Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan	Rp.	3.470.820.000

# **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Perkebunan di Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu sub sektor strategis yang secara ekonomis, ekologis dan sosial budaya memainkan peranan penting dalam pembangunan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, bahwa secara ekonomi perkebunan berfungsi meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah Provinsi Sumatera Utara dan nasional, sedangkan secara ekologi berfungsi meningkatkan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen dan penyangga kawasan lindung serta secara sosial budaya berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

Beberapa indikator makro ekonomi sebagai fungsi perkebunan di Sumatera Utara antara lain sebagai berikut:

#### **1. Kontribusi Subsektor Perkebunan terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010-2014**

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan ekonomi regional dan melalui pergeseran kehiatan ekonomi dari sector primer ke sector sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin. Untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat, perlu disajikan statistik Pendapatan Nasional/Regional secara berkala.

Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terdiri dari sub lapangan usaha yaitu: pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian meliputi tanaman pangan, tanaman hortikultura semusim, perkebunan

semusim, tanaman hortikultura tahunan, perkebunan tahunan, peternakan dan jasa pertanian dan perburuan.

Pada tahun 2014 lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 23,18 persen. Sublapangan usaha perkebunan tahunan merupakan penyumbang terbesar terhadap lapangan usaha pertanian yaitu 50,88 persen dari seluruh nilai tambah pertanian. Sublapangan usaha perkebunan tahunan berkontribusi sebesar 11,80 persen terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan sublapangan usaha perkebunan semusim memberikan kontribusi sebesar 0,06 persen terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara

Tabel 3. Distribusi Persentase PDRB Provinsi Sumatera Utara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2010-2014

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	25.84	25.42	24.92	24.50	23.18
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	22.56	22.21	21.69	21.27	19.94
a	Tanaman Pangan	4.25	4.04	4.05	3.88	3.64
b	Tanaman Holtikultura Semusim	0.24	0.24	0.23	0.22	0.18
c	Perkebunan Semusim	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06
d	Tanaman Holtikultura Tahunan dan Lainnya	2.81	2.76	2.52	2.44	2.23
e	Perkebunan Tahunan	13.04	13.01	12.76	12.65	11.80
f	Peternakan	1.96	1.89	1.87	1.82	1.83
g	Jasa Pertanian dan Perburuan	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	1.06	1.01	0.99	0.97	0.96
3	Perikanan	2.22	2.21	2.23	2.26	2.30
B	Pertambangan dan Penggalian	1.01	1.07	1.16	1.40	1.33
C	Industri Pengolahan	21.31	21.20	20.66	19.83	19.90
D	Pengadaan Listrik, Gas	0.15	0.17	0.15	0.12	0.10
E	Pengadaan Air	0.10	0.09	0.10	0.09	0.10
F	Konstruksi	11.67	11.81	12.33	12.97	13.60
G	Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil	17.08	17.06	17.00	16.66	17.11
H	Transportasi dan Pergudangan	4.26	4.40	4.57	4.89	4.95
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.10	2.09	2.18	1.25	2.35
J	Informasi dan Komunikasi	2.25	2.15	2.15	2.04	1.96
K	Jasa Keuangan	2.92	2.97	3.23	3.35	3.28
L	Real Estate	3.87	4.06	3.92	4.27	4.35
M,N	Jasa Perusahaan	0.82	0.84	0.87	0.90	0.92
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan	3.39	3.45	3.55	3.49	3.60

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
P	Jasa Pendidikan	2.02	1.94	1.90	1.88	1.90
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.76	0.81	0.84	0.85	0.88
R,S,T	Jasa Lainnya	0.46	0.47	0.47	0.50	0.51
	<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

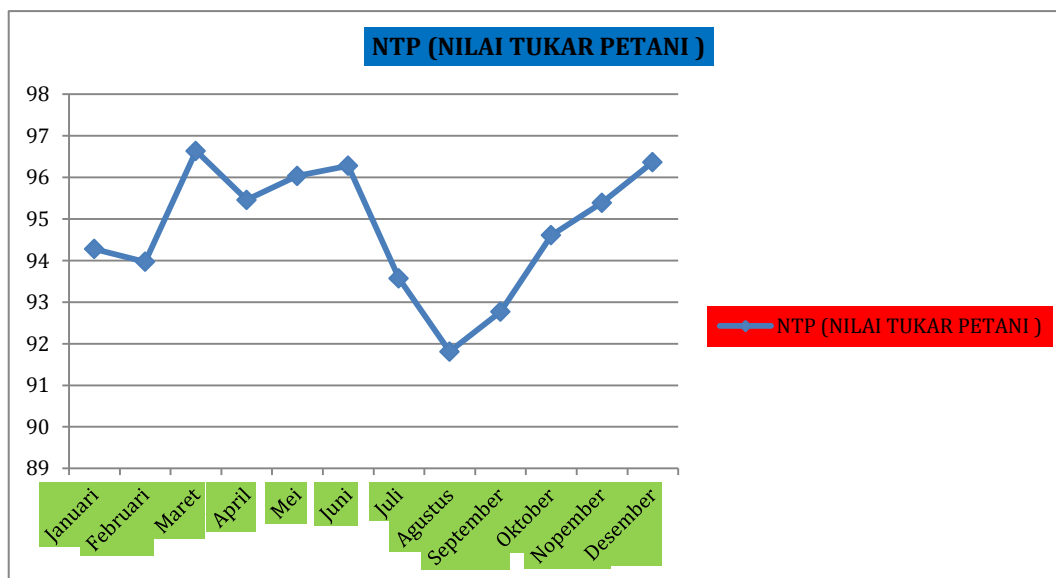
## 2. Nilai Tukar Petani Perkebunan

Nilai Tukar Petani (NTP) yang diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani (dalam persentase), merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani.

Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaan di Provinsi Sumatera Utara pada Desember 2015, NTP Provinsi Sumatera Utara mengalami kenaikan 1,09 persen dibanding November 2015, yaitu dari 99,54 menjadi 100,62. Kenaikan NTP pada Desember 2015 disebabkan kenaikan indeks harga hasil produksi pertanian lebih tinggi jika dibandingkan dengan kenaikan indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun untuk keperluan produksi pertanian.

NTPR pada tahun 2015 mengalami fluktuasi yaitu sebesar 94,28 pada bulan Januari dan meningkat menjadi 96,37 pada Desember 2015. Sedangkan NTPR terendah terjadi pada bulan Agustus sebesar 91,81, sedangkan tertinggi terjadi pada bulan Maret sebesar 96,64. Rata rata NTPR perkebunan pada tahun 2015 sebesar 94,77. NTP subsektor perkebunan pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Nilai Tukar Petani Perkebunan Tahun 2015



\*) Sumber data BPS Sumut

### 3. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran strategis meningkatnya luas areal, produksi dan produktivitas tanaman perkebunan khususnya perkebunan rakyat dengan beberapa indikator kinerja pada tahun 2015 sesuai dengan target pada Renstra tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Realisasi capaian sasaran strategis tahun 2015

No.	INDIKATOR KINERJA	Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi Capaian Setiap Tahun		
		2013*)	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Produktivitas tanaman Perkebunan Rakyat (%/thn)	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,05	2,35	2,32
2	Produksi (ton)	6,245,195.94	6,405,697.46	6,570,323.89	6,739,181.22	6,912,378.18	7,090,026.31	6,159,747.08	6,304,744.42	6,451,234.00
3	Luas Areal (ha)	1,100,649.60	1,101,253.20	1,101,857.22	1,102,461.67	1,103,066.63	1,103,672.08	1,127,913.99	1,128,858.71	1,129,704.00

\*) Angka sementara

Dari hasil pengukuran kinerja diatas diketahui bahwa realisasi capaian kinerja masing masing indikator sebagai berikut:

#### 1. Produktivitas/ Laju pertumbuhan

Realisasi produksi perkebunan rakyat pada tahun 2015 sebesar 6,451,234.00 ton atau mengalami peningkatan sebesar 146.489,58 ton atau mengalami peningkatan produktivitas sebesar 2,32%/tahun dari tahun 2014 sebesar 6,304,744.42 ton. Hal ini menggambarkan bahwa indikator



produktivitas tanaman perkebunan pada tahun 2015 dapat **belum tercapai** dari target yang direncanakan sebesar 2,57%/tahun. Apabila dibandingkan dengan peningkatan produksi pada tahun 2014 maka pertumbuhan produksi pada tahun 2015 lebih kecil dari tahun 2014. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi harga jual karet dan Crude Palm Oil (CPO) yang rendah sehingga para petani karet maupun kelapa sawit kurang aktif memberikan pupuk kepada tanaman karet atau kelapa sawit dikarenakan biaya produksi yang lebih besar dari hasil panen yang diterima.

## 2. Produksi

Realisasi capaian produksi perkebunan rakyat dari tahun 2013 sampai dengan 2015 terus mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2015 pencapaian produksi **belum mencapai target yang ditetapkan** yaitu sebesar 6,451,234.00 ton dari target yang diinginkan sebesar 6.570.323,89 ton. Peningkatan produksi terbesar pada komoditas sawit 130,086 ton TBS, karet sebesar 1.480,00 ton, kopi arabika 2.947,49 ton, kopi robusta 2,239,48 ton, kelapa 3.194,00 ton dan kakao sebesar 3.049,00 ton. Peningkatan produksi perkebunan rakyat dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 6. Produksi Perkebunan Rakyat 2014-2015

No	Komoditi		Perkebunan Rakyat		
			Tahun 2014 (ton)	Tahun 2015 (ton)	Selisih (ton)
1	Karet		332,674.00	334,154.00	1,480.00
2	Kelapa Sawit	TBS	5,745,235.00	5,875,321.00	130,086.00
		MS	1,263,952.00	1,282,025.00	18,073.00
		IS	172,357.00	183,124.00	10,767.00
3	Kopi Arabika		49,176.51	52,124.00	2,947.49
	Kopi Robusta		8,887.52	11,127.00	2,239.48
4	Kelapa		91,662.00	94,856.00	3,194.00
5	Kakao		41,266.00	44,315.00	3,049.00
6	Cengkeh		528.42	612.00	83.58
7	Kemenyan		4,968.82	5,124.00	155.18
8	Kulit Manis		3,408.72	3,725.00	316.28
9	Nilam		293.00	324.00	31.00
10	Kemiri		12,583.27	12,854.00	270.73
11	Tembakau		1,519.78	1,895.00	375.22
12	Tebu		3,408.38	5,214.00	1,805.62
13	Pala		40.65	51.00	10.35
14	Lada		95.53	98.00	2.47
15	Kapuk		133.65	141.00	7.35
16	Gambir		1,833.54	1,912.00	78.46
17	Aren		3,233.25	3,468.00	234.75
18	Pinang		3,675.38	3,780.00	104.62
19	Vanili		88.20	95.00	6.80
20	Jarak		9.00	12.00	3.00

No	Komoditi	Perkebunan Rakyat		
		Tahun 2014 (ton)	Tahun 2015 (ton)	Selisih (ton)
21	Kapulaga	18.80	24.00	5.20
22	Jambu Mete	5.00	8.00	3.00
	Jumlah	6,304,744.42	6,451,234.00	146,489.58

### 3. Luas

Realisasi capaian kinerja Luas areal perkebunan khususnya perkebunan rakyat telah dapat **dicapai** hal ini dikarenakan subsektor perkebunan masih menjadi komoditas primadona bagi masyarakat Sumatera Utara sebagai mata pencahariannya. Luas areal perkebunan rakyat pada tahun 2015 seluas 1,129,704.00 Ha atau meningkat seluas 845.29 Ha dari tahun 2014 seluas 1,128,858.71 Ha. Luas areal perkebunan rakyat pada tahun 2014-2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7. Luas Perkebunan Rakyat 2014-2015

No	Komoditi	Perkebunan Rakyat		
		Tahun 2014 (Ha)	Tahun 2015 (Ha)	Selisih (Ha)
1	Karet	395,017.00	395,124.00	107.00
2	Kelapa Sawit	416,475.11	416,552.00	76.89
3	Kopi Arabika	61,231.44	61,285.00	53.56
	Kopi Robusta	20,853.81	20,895.00	41.19
4	Kelapa	110,122.13	110,130.00	7.87
5	Kakao	64,934.36	64,965.00	30.64
6	Cengkeh	3,168.25	3,170.00	1.75
7	Kemenyan	22,897.80	22,900.00	2.20
8	Kulit Manis	5,712.20	5,752.00	39.80
9	Nilam	832.00	834.00	2.00
10	Kemiri	10,968.00	10,988.00	20.00
11	Tembakau	1,691.00	1,702.00	11.00
12	Tebu	900.00	1,185.00	285.00
13	Pala	140.70	142.00	1.30
14	Lada	162.70	182.00	19.30
15	Kapuk	471.65	480.00	8.35
16	Gambir	2,003.40	2,006.00	2.60
17	Aren	5,288.91	5,416.00	127.09
18	Pinang	5,719.15	5,720.00	0.85
19	Vanili	207.60	210.00	2.40
20	Jarak	19.00	21.00	2.00
21	Kapulaga	25.50	28.00	2.50
22	Jambu Mete	17.00	17.00	-
	Jumlah	1,128,858.71	1,129,704.00	845.29

Secara umum potensi perkebunan di Sumatera Utara pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 8. Rekapitulasi Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Jenis Usaha dan Komoditi di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 (estimasi angka sementara)

No	Jenis Komoditas	Perkebunan Rakyat		PTPN		PBSN		PBSA		Total Luas (Ha)	Total Produksi (ton)	
		Luas (Ha)	Produksi (ton)	Luas (Ha)	Produksi (ton)	Luas (Ha)	Produksi (ton)	Luas (Ha)	Produksi (ton)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Karet	395,124.00	334,154.00	38,529.85	35,107.84	102,238.00	119,864.00	53,299.00	71,556.00	589,190.85	560,681.84	
2	Kelapa Sawit	TBS	416,552.00	5,875,321.00	286,529.39	4,699,427.16	346,009.00	5,376,885.83	154,187.00	2,654,857.00	1,203,277.39	18,606,490.99
		MS		1,282,025.00		1,092,587.54		1,182,914.88		584,068.54	-	4,141,595.96
		IS		183,124.00		188,301.15		215,075.43		106,194.28	-	692,694.86
3	Kopi Arabika	61,285.00	52,124.00	-	-					61,285.00	52,124.00	
	Kopi Robusta	20,895.00	11,127.00	-	-	810.00	776.00	-	-	21,705.00	11,903.00	
4	Kelapa	110,130.00	94,856.00	-	-	1,851.00	2,146.00	1,140.00	1,349.00	113,121.00	98,351.00	
5	Kakao	64,965.00	44,315.00	-	-	441.00	353.00	-	-	65,406.00	44,668.00	
6	Cengkeh	3,170.00	612.00	-	-	-	-	-	-	3,170.00	612.00	
7	Kemenyan	22,900.00	5,124.00	-	-	-	-	-	-	22,900.00	5,124.00	
8	Kulit Manis	5,752.00	3,725.00	-	-	-	-	-	-	5,752.00	3,725.00	
9	Nilam	834.00	324.00	-	-	-	-	-	-	834.00	324.00	
10	Kemiri	10,988.00	12,854.00	-	-	-	-	-	-	10,988.00	12,854.00	
11	Tembakau	1,702.00	1,895.00	580.00	225.00	-	-	-	-	2,282.00	2,120.00	
12	Tebu	1,185.00	5,214.00	6,972.10	31,082.16	-	-	-	-	8,157.10	36,296.16	
13	Pala	142.00	51.00	-	-	-	-	-	-	142.00	51.00	
14	Lada	182.00	98.00	-	-	-	-	-	-	182.00	98.00	
15	Kapuk	480.00	141.00	-	-	-	-	-	-	480.00	141.00	
16	Gambir	2,006.00	1,912.00	-	-	-	-	-	-	2,006.00	1,912.00	
17	The	-	-	3,904.08	6,948.00	-	-	-	-	3,904.08	6,948.00	
18	Aren	5,416.00	3,468.00	-	-	-	-	-	-	5,416.00	3,468.00	
19	Pinang	5,720.00	3,780.00	-	-	-	-	-	-	5,720.00	3,780.00	
20	Vanili	210.00	95.00	-	-	-	-	-	-	210.00	95.00	
21	Jarak	21.00	12.00	-	-	-	-	-	-	21.00	12.00	
22	Kapulaga	28.00	24.00	-	-	-	-	-	-	28.00	24.00	
23	Jambu Mete	17.00	8.00	-	-	-	-	-	-	17.00	8.00	
24	Sereh Wangi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah :		1,129,704.00	2,041,062.00	336,515.42	1,354,251.69	451,349.00	1,521,129.32	208,626.00	763,167.82	2,126,194.42	5,679,610.83	

\*) Estimasi angka sementara 2015

NB: Perhitungan produksi kelapa sawit berdasarkan satuan Minyak Sawit (MS) dan Inti Sawit (IS)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa luas areal perkebunan Sumatera Utara mencapai 2,126,194.42 ha dengan total produksi sebesar 5,679,610.83 ton yang terdiri dari Perkebunan Rakyat seluas 1,129,704.00 ha (53,13%) dengan total produksi mencapai 2,041,062.00 ton (35,94%). Sedangkan luas perkebunan PTPN mencapai 336,515.42 ha (15,83%) dengan total produksi sebesar 1,354,251.69 ton (23,84%), PBSN seluas 451,349.00 ha (21,23%) total produksi 1,521,129.32 ton (26,78%) dan PBSA seluas 208,626.00 ha (9,81%) dengan total produksi sebesar 763,167.82 ton (13,44%).

Perkebunan rakyat yang luasannya lebih besar dibandingkan dengan jenis usaha perkebunan lainnya di Provinsi Sumatera Utara, namun dalam kontribusi produksi, perkebunan rakyat masih jauh tertinggal apabila dibanding dengan yang dicapai perkebunan besar lainnya. Secara umum kondisi rendahnya produksi perkebunan rakyat di masing-masing disebabkan berbagai masalah yang menyangkut kemampuan SDM, keterbatasan modal, rendahnya pemanfaatan iptek yang pada gilirannya akan menyebabkan terbatasnya kegiatan intensifikasi, peremajaan maupun rehabilitasi yang dilaksanakan oleh perkebunan rakyat.

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut sekaligus mendorong petani untuk mampu mengembangkan dirinya serta kelompoknya ke dalam kelembagaan ekonomi/koperasi serta dapat memanfaatkan potensi ekonomi secara efisien dan berdaya saing tinggi, maka kebijaksanaan pembangunan perkebunan Sumatera Utara diarahkan pada Pengembangan Sistem dan Usaha Agribisnis Berbasis Perkebunan.

Untuk mewujudkan kesejahteraan pelaku usaha pekebunan melalui penerapan Sistem Agribisnis yang berdaya saing, berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Sumatera Utara, akan ditempuh kebijaksanaan yang mendorong dan memfasilitasi peningkatan produksi perkebunan Sumatera Utara terutama perkebunan rakyat melalui Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas tanaman perkebunan dengan kegiatan-kegiatan utama yaitu :

1. Penyediaan benih unggul dan sarana produksi perkebunan,
2. Penerapan dan pengembangan paket teknologi produksi dan peningkatan produk mutu hasil perkebunan,
3. Optimalisasi pemberdayaan sumberdaya lahan dan air untuk mendukung sub sektor perkebunan,
4. Menciptakan iklim investasi yang kondusif berbasis pedesaan dalam pembangunan perkebunan,

5. Peningkatan kapasitas SDM penyuluh, petugas serta petani dan kelembagaannya melalui pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan,
6. Memperkuat kelembagaan petani dan kelembagaan usaha dalam peningkatan posisi tawar (bargaining position) petani,
7. Meningkatkan akses petani dalam sistem kerjasama kemitraan terhadap sumber dana permodalan non bank.
8. Fasilitasi penataan kelembagaan perkebunan melalui pengembangan jejaring kerjasama, pengembangan kelembagaan petani, pemasaran hasil serta kelembagaan usaha lainnya di sentra perkebunan rakyat.
9. Pengembangan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan di sentra-sentra perkebunan rakyat melalui penyebaran unit pengolahan hasil dan peningkatan volume hasil perkebunan rakyat baik di pasar lokal maupun pasar luar negeri.
10. Pengembangan sarana dan prasarana pada sentra produksi perkebunan rakyat melalui pengembangan sarana produksi (pupuk dan pestisida), alat dan mesin perkebunan dan pengembangan jalan usaha tani di sentra produksi perkebunan rakyat Sumatera Utara.

## B. Realisasi Keuangan

Laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dimaksudkan agar pengelolaan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab sekaligus tetap memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Realisasi anggaran pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara pada TA. 2014 sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp. 31,769,024,050.- (87.98%) dari total anggaran sebesar Rp. 36,109,057,926.-.

Tabel 11. Realisasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung TA.2015

KODE REKENING	URAIAN JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK BELANJA	PERKEMBANGAN KEUANGAN			SISA ANGGARAN ( 4.a - 4.d )
		Jumlah Biaya Menurut APBD/P.APBD	Jumlah Realisasi s/d Bulan N	( 4.d )	
			( 4.b + 4.c )	( 4.a )	
		(Rp)	(Rp)	(%)	

1							2	3.a	3.b	3.c	4
2.01	2	0	0	5	1		<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	14,731,841,000	13,763,540,537	93.43	968,300,463
2.01	2	0	0	5	1		BELANJA PEGAWAI	14,731,841,000	13,763,540,537	93.43	968,300,463
<b>JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>								<b>14,731,841,000</b>	<b>13,763,540,537</b>	<b>93.43</b>	<b>968,300,463</b>
2.01	2	0	0	5	2		<b>BELANJA LANGSUNG</b>	21,377,216,926	18,005,483,513	84.23	3,371,733,413
2.01	2	0	0	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	3,342,026,500	2,880,526,500	86.19	461,500,000
2.01	2	0	0	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	15,942,595,626	13,066,121,213	81.96	2,876,474,413
2.01	2	0	0	5	2	3	BELANJA MODAL	2,092,594,800	2,058,835,800	98.39	33,759,000
<b>JUMLAH BELANJA LANGSUNG</b>								<b>21,377,216,926</b>	<b>18,005,483,513</b>	<b>84.23</b>	<b>3,371,733,413</b>
<b>TOTAL BELANJA (BELANJA TIDAK LANGSUNG + BELANJA LANGSUNG)</b>								<b>36,109,057,926</b>	<b>31,769,024,050</b>	<b>87.98</b>	<b>4,340,033,876</b>

Realisasi anggaran belanja langsung berdasarkan program dan kegiatan TA. 2015 sebesar Rp. **18,005,483,513.-** (84,23%) dari pagu sebesar Rp. **21,377,216,926.-**. Rendahnya pencapaian realisasi anggaran keuangan dimaksud karena kegiatan-kegiatan yang dialokasikan pada P.APBD TA.2015 tidak dapat terealisasi karena waktu yang sudah sangat mendesak. DPA P.APBD baru di sahkan oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 23 Desember 2015. Alokasi dana pada kegiatan P.APBD tersebut yaitu sebesar Rp. 2.808.799.626,- yang merupakan kegiatan pengembangan peningkatan produksi tembakau yang berasal dari sumber dana DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau). Sisa dana lainnya yang tidak digunakan pada alokasi dana APBD murni hanya untuk tujuan efisiensi.

# BAB IV

## P E N U T U P

### A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Tahun 2015 merupakan sarana evaluasi dan pengendalian yang sangat efektif agar pelaksanaan pembangunan perkebunan sesuai sasaran dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

Hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan pembangunan perkebunan tahun anggaran 2015 untuk mencapai sasaran 3 target indikator utama Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara terealisasi sebagai berikut :

1. Perkebunan rakyat yang luasannya lebih besar dibandingkan dengan jenis usaha perkebunan lainnya di Provinsi Sumatera Utara, namun dalam kontribusi produksi, perkebunan rakyat masih jauh tertinggal apabila dibanding dengan yang dicapai perkebunan besar lainnya.
2. Realisasi produksi perkebunan rakyat pada tahun 2015 sebesar 6,451,234.00 ton atau mengalami peningkatan sebesar 146.489,58 ton atau mengalami peningkatan produktivitas sebesar 2,32%/tahun dari tahun 2014 sebesar 6,304,744.42 ton. Hal ini menggambarkan bahwa indikator produktivitas tanaman perkebunan pada tahun 2015 dapat **belum tercapai** dari target yang direncanakan sebesar 2,57%/tahun.
3. Realisasi capaian produksi perkebunan rakyat dari tahun 2013 sampai dengan 2015 terus mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2015 pencapaian produksi **belum mencapai target yang ditetapkan** yaitu sebesar 6,451,234.00 ton dari target yang diinginkan sebesar 6.570.323,89 ton.
4. Realisasi capaian kinerja Luas areal perkebunan khususnya perkebunan rakyat telah dapat **dicapai** hal ini dikarenakan subsektor perkebunan masih menjadi komoditas primadona bagi masyarakat Sumatera Utara sebagai mata pencahariannya. Luas areal perkebunan rakyat pada tahun 2015 seluas 1,129,704.00 Ha atau meningkat seluas 845.29 Ha dari tahun 2014 seluas 1,128,858.71 Ha.

5. Realisasi anggaran belanja langsung berdasarkan program dan kegiatan TA. 2015 sebesar Rp. **18,005,483,513.-** (84,23%) dari pagu sebesar Rp. **21,377,216,926.-**. Rendahnya pencapaian realisasi anggaran keuangan dimaksud karena kegiatan-kegiatan yang dialokasikan pada P.APBD TA.2015 tidak dapat terealisasi karena waktu yang sudah sangat mendesak. DPA P.APBD baru di sahkan oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 23 Desember 2015. Alokasi dana pada kegiatan P.APBD tersebut yaitu sebesar Rp. 2.808.799.626,- yang merupakan kegiatan pengembangan peningkatan produksi tembakau yang berasal dari sumber dana DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau).

## **B. Saran**

Dengan capaian tersebut, untuk mempertahankan capaian target lebih lanjut maka perlu dilakukan pengawalan dan evaluasi untuk mengetahui permasalahan yang timbul dan tindakan yang akan dilaksanakan.

Saran dan rekomendasi untuk pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) pembangunan perkebunan di Sumatera Utara yang perlu ditekankan adalah untuk pencapaian produksi dan produktivitas, maka perlu adanya dukungan kegiatan yang dapat memacu peningkatan produksi tanaman sehingga produktivitasnya meningkat dan tidak terlalu jauh dari jenis perusahaan lainnya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara yang menggambarkan capaian Kinerja pada tahun 2015.